



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive
strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MARDIATUL ULFA
NIM. 11575204928

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARDIATUL ULFA
NIM : 11575204928
FAKULTAS /JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING


Afrizal, S.Sos, M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI:

DEKAN

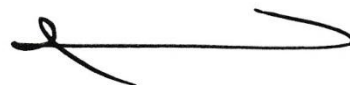
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP.196205121989031003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARDIATUL ULFA
NIM : 11575204928
FAKULTAS /JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
JUDUL : PERAN KEPALA DESA DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR
UTARA KABUPATEN KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 27 SEPTEMBER 2019

DISETUJUI OLEH:

KETUA PENGUJI



Drs. ALMASRI, M.Si
NIP. 19670801 200501 1 007

MENGETAHUI:

PENGUJI I



MUSLIM S. Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

PENGUJI II



MHD.RAFI, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

**MARDIATUL ULFA
NIM. 11575204928**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Permasalahan yang diteliti bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan data sekunder dan data primer. Data-datat ersebut dapat melalui pengamatan langsung atau obsevasi, dan wawancara. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan lengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan dan beberapa saran. Rumusan masalah penulis skripsi ini adalah bagaimanakah peran kepala desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dilihat dari segi perencanaan dikategorikan cukup baik. Dilihat dari pelaksanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ssawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang dilakukan kepala desa telah cukup baik. Sedangkan pengawasan dikategorikan cukup baik, artinya pengawasan/evaluasi dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Utara Kabupaten Kampar dilakukan Kepala Desa telah cukup baik.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, peran Kepala Desa, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). UU Desa No 6 Tahun 2014*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga senetiasa kita persembahkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada semua makhluknya. Dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Solawat berserta Salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad S A W, seorang tokoh yang telah berjuang menegakkan syariat islam di muka bumi Allah ini, sehingga berkat perjuangan-Nyalah kita bisa merasakan nikmatnya islm dan perubahan pola fikir dari zaman kebodohan kepala zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Semonga kita termasuk orang-orang yang dicintai Nabi S A W.....Amin.

Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ” PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

Dengan izin Allah, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama keluarga tercinta itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda M. Nuri dan Ibunda Hj. Rohma Yulis yang telah begitu tulus memberikan kasih sayang, bimbingan, pengorbanan mengiringi dengan do’a demi kesuksesan Ananda. Buat Abang H.Zainal Abidin beserta Istri, Arizal beserta istri, dan buat Abang Irwan Zulfan , kakak –kakak , Abang-abang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dan buat , beserta semua keponakan penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S Ag, M. Ag, Wakil Rektor 1 Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnedi, M. Pd, Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs, H. Muh. Said, M. Ag, beserta Wakil Dekan II Ibu Dr. Julina, S. E, M. Si, serta Wakil Dekan III Bapak Dr.Amrul Muzan, S. HI, M. Ag, dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan rekomnedasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si. Beserta Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Ibu Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP, yang telah meng- Acc judul penelitian ini.
4. Penasehat Akademik penulis Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Sc yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembimbing Skripsi penulis Bapak Afrizal, S. Sos, M. Si yang telah memberikan kemudahan, bantuan, arahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepala dan Staf pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan Fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktu dari informasi kepada penulis.
9. Seluruh Teman dan Sahabat ananda, popi, danis, desi, yuni, ningsih, wiken, dianada, yuli, vita dan Seperjuangan Administrasi Negara/F Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah SWT Memberikan balasan berlipat ganda atas segala Dukungan dan bantuan yang penulis terima. Mudah –mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Agustus 2019

MARDIATUL ULFA
NIM 11575204928

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Otonomi.....	15
2.2 Otonomi Daerah	16
2.3 Otonomi Desa.....	18
2.4 Konsep Peranan.....	21
2.5 Peran Kepala Desa	22
2.6 Kewenangan Desa	23
2.7 Tugas dan Fungsi Kepala Desa	23
2.8 Pemerintah Desa.....	24
2.9 Peranan Pemerintah Desa.....	26
2.10 Implementasi Kebijakan.....	30
2.11 Pembangunan Desa	33
2.12 Penelitian Terdahulu	33
2.13 Pandangan Islam	35
2.14 Defenisi Konsep	36
2.15 Variabel Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2	Jenis Penelitian	40
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	40
3.3 1.	Data Primer	40
3.3 2.	Data Sekunder.....	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.	Observasi.....	41
2.	Wawancara.....	41
3.	Dokumentasi	42
3.5	Teknik Informan	42
3.6	Analisis Data.....	42
1.	Reduksi Data.....	43
2.	Penyajian Data	43
3.	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1	Geografis Desa Sawah	45
4.2	Demografis.....	45
4.3	Pendidikan	47
4.4	Kehidupan Beragama.....	49
4.5	Sosial Ekonomi Masyarakat	50
4.6	Adat Istiasat	52
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1	Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Aalokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	53
5.2	Perencanaan	57
5.3	Pelaksanaan.....	61
5.4	Pengawasan/evaluasi	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.5 Hambatan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	67
--	----

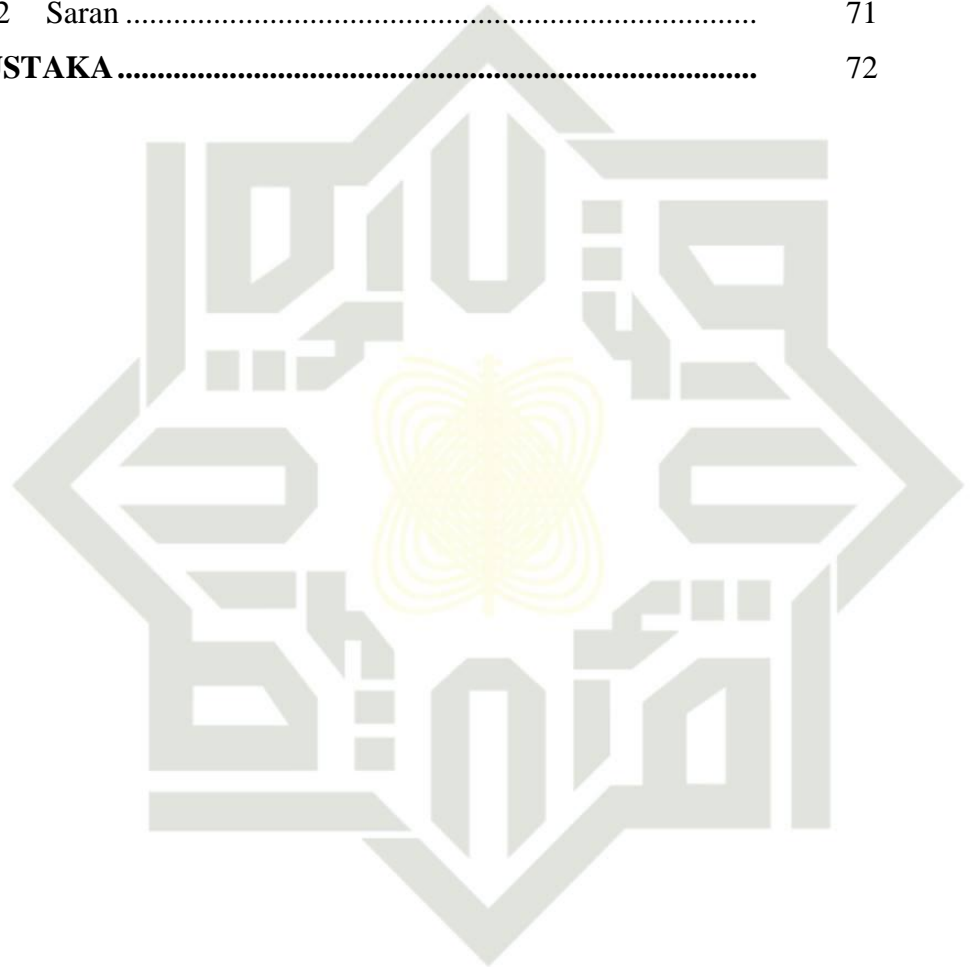
BAB VI PENUTUP	70
-----------------------------	-----------

6.1 Kesimpulan	70
----------------------	----

6.2 Saran	71
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	3
Tabel 1.2	Musyawarah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Sawah Tahun 2017	9
Tabel 2.1	Konsep Operasional	38
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian.....	42
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Usia/ Umur.....	46
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.4	Jumlah Sarana pendidikan.....	48
Tabel 4.5	Jumlah Penganut Agama	49
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Peribadatan dari Masing-masing Agama.....	50
Tabel 4.7	Jenis Mata Pencarian	51

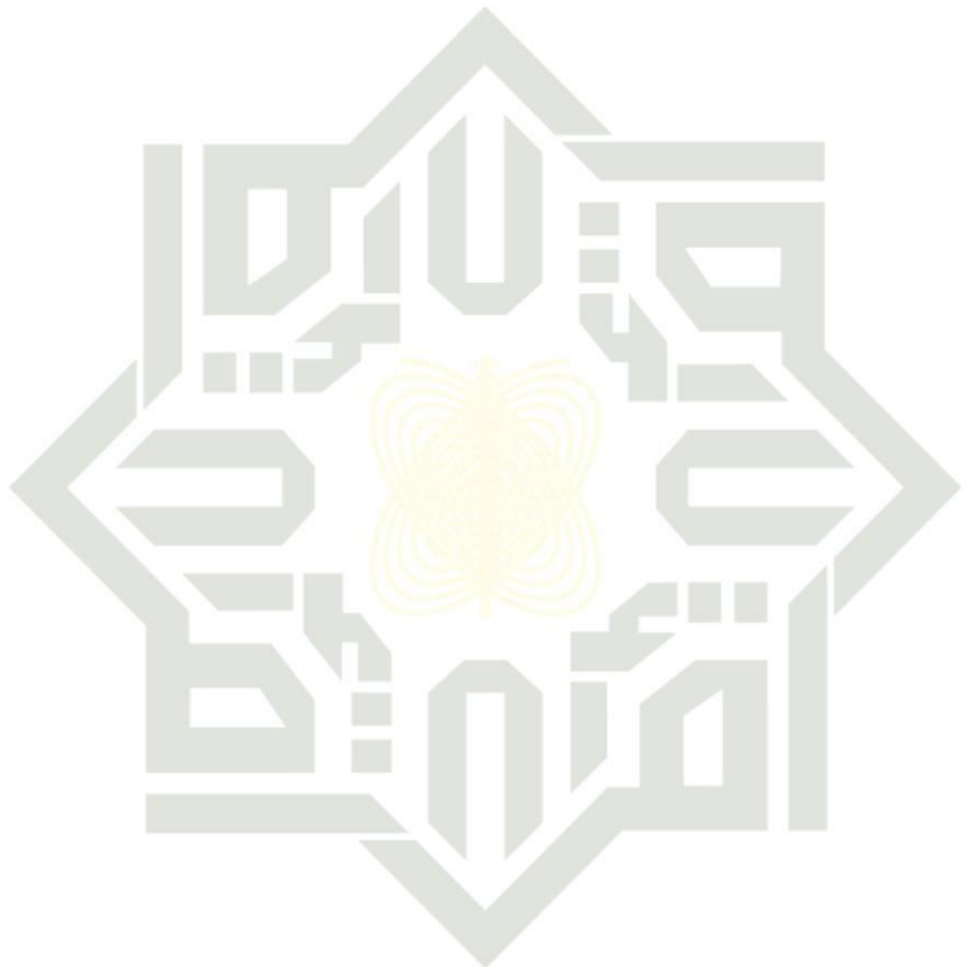


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	39
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	53



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa adalah undang-undang yang berlaku sekarang setelah undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004 dan atas berlakukannya undang-undang baru ini bearti segala ketentuan tentang pemerintah desa khususnya, sudah harus segera dilakukan penyesuaian.

Dasar pemikiran undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sesuai dengan amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun wewenang yang berpatokan pada desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah, kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia/ kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran kepala desa Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, dan makmur dan sejahtera, bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang- undang, Undang – undang tentang desa yang di maksud bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang pertunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam Struktur organisasi pemerintahan desa, di sebutkan bahwa:”Kepala Desa dalah pemimpin Pemerintahan Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya di banatu oleh prangkat desa. Kepala Desa diangkat dan di lantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat di perpanjang lagi untuk satu kali jabatan Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Pemahaman Desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, masyarakat adat/primodial atau tradisional sangatlah berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban) dalam menggerakkannya. Karna sebagai msyarakat desa pada umumnya hanya dapat di gerakkan dengan meperhatikan adat setempat yang hidup dan berkembang serta diikuti dan dipelihara oleh masyarakat. (HAW. Widjaja, 2003 : 11).

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mangatur dan mengurus komunitasnya, desar berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan ekonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Widjaja (2003:133) menyatakan bahwa desa memiliki pontesi yang sangat tradisi, sehingga di perluhkan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan

otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi desa. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - 1) Hasil usaha desa;
 - 2) Hasil kekayaan desa;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) Hasil gotong royong;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bangian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragam, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan langsung ADD adalah dana Bantuan Lansung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan

masyarakat, kelembangaan dan prasarana desa yang diperluhkan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang bermanfaat dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawab oleh Kepala Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dianggarkan untuk pemerintah desa paling sedikit 10% dari APBD yang diperoleh dan ditambah bagi hasil pajak lalu dikurangi belanja pegawai. Sepuluh persen (10%) dari hasil penambahan dan pengurangan itulah yang dijadikan dana alokasi desa. Hitungan ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Arif (2007:55) dalam Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
2. Seluruh kegiatan yang di alami dilokasi dana desa di rencanakan,di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
3. Seluruh kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,terarah dan terkendali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pemberian Bantuan langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Mengingatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pembangunan dan masyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau Dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerinta desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana desa (ADD) ini, diharapkan desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan tingkat desa. Selain itu dengan adanya ADD, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tambah harus lama menunggu datangnya Dana bantuan dari pemerintah pusat. Berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tabel penerimaan alokasi Dana desa di Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 1.1 Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

No	Tahun Anggaran	Jumlah	Penanggung Jawab
1	2017	423.46,000	Kepala Desa
2	2018	444.976,000	Kepala Desa

Sumber: Kantor Kepala Desa Sawah 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat di ketahui bahwa penerimaan alokasi dana desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebesar **Rp423.46,000** dan pada tahun 2018 sebesar **Rp 444.976,000** dengan demikian Desa Sawah Kecamatan Kampar berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan ADD sesuai dasar hukum yang telah ditetapkan.

Dengan sudah ditetapkannya berbagai macam dasar hukum mengenai ADD diatas, maka sangat di butuhkan figure kepala desa yang mampu memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dengan sebaik-baiknya. Urgensinya ialah supaya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Sawah dapat berjalan lancar, untuk itu kepala desa harus mampu melakukan kerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD), karena sesuai dengan konsesus bersama untuk membawa masyarakat Desa kepada keadaan yang lebih baik tidaklah terlepas dari tuntutan pembaharuan-pembaharuan dalam segal jenis perubahan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.II Musyawarah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

NO	Tahun Anggran	Peserta	Jumlah
2017		Kepala desa	1
		Perangkat desa	4
		BPD	3
2018		Kepala Desa	1
		Perangkat Desa	4
		BPD	3
		Kepala Dusun	4

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Sawah 2017

Berdasarkan tabel di atas, ketahui bahwa pada tahun anggran 2017 dan 2018 selama ini masyarakat tidak pernah diundang baik secara tertulis maupun lisan untuk mengikuti rapat/pertemuan mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar. Kepala Desa dalam menentukan pemanfaatan Alokasi Dana Desa hanya dilaksanakan dengan perangkat Desa dan BPD, namun tak seluruh anggota BPD hadir dalam musyawarah tersebut dan juga tidak melibatkan lembaga-lembaga desa sawah seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepemudaan bahkan LPM.

Secara lebih terperinci jumlah Belanja Pemberdayaan dan pembangunan Desa Sawah tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.III Jumlah Pengelokasian Belanja Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Sawah Tahun 2017

No	Belanja	Jumlah (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Pembangunan prasarana Pemdes			
	- Pembangunan Balai Desa	-	-	-
	- Pengadaan Perlengkapan Balai Desa	-	-	-
2	Bantuan Soal			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Belanja	Jumlah (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	- Bantuan sosial kepada remaja masjid	-	-	-
	- Bantuan sosial kepada kelompok dana wisma	-	-	-
	- Bantuan kepada kegiatan keolahragaan	4.000.000	4.000.000	-
2	Pemberdayaan Lain-Lain			
	- Bantuan kepada PPK desa	4.000.000	4.000.000	-
		12.500.000	11.500.000	1.000.000
	- Kegiatan perayaan hari besar nasional	-	-	-
	- Kegiatan perayaan hari besar keagamaan	4.000.000	4.000.000	-
	- Bantuan kepada lembaga kepemudaan	4.000.000	4.000.000	-
	- Bantuan kepada LPM desa	72.000.000	72.000.000	-
	- Bantuan kepada RT dan RW	2.500.000	2.500.000	-
	- Bantuan kepada posyandu desa	59.200.000	59.000.000	2.00.000
	- Bantuan kepada panitia pembentukan pengurus BPD	-	-	-
	- Bantuan kepada imam masjid	-	-	-
	- Bantuan kepada guru gaji tradisional	31.200.000	31.00.000	2.00.000
	- Bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan (Rombel/MDA/MTS/M A)	24.000.000	20.000.000	4.00.000
	- Bantuan kepada guru pendidikan anak usia dini			
	Jumlah	217.400.000	212.200.000	1.800.000

Sumber : Bangian Pemerintahan Desa Sawah,2017

Berdasarkan tabel I.II di atas diketahui bahwa jumlah anggaran

Belanja Pemberdayaan dan pembangunan Desa Sawah Tahun 2017

Rp.217.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.212.200.000 dan tidak teralisasi Rp. 1800.000 Dengan demikian terlihat bahwa manfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan tujuan, karna seharusnya ADD yang diterima Pemerintahan Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik sehingga masyarakat bisa menikmati, ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan, karna tujuan dari program pemberdayaan tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani Kepala Desa. Disamping itu, permasalahan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adanya indikasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang belum sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelola Keuangan Desa, tentulah sangat berpotensi menimbulkan dampak. Yang berakibat pada pemerintahan maupun masyarakat desa sawah antara lain berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Apakah yang menjadi hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa sawah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teotiritas

Secara teotiritas hasil penelitian ini dingunakn untuk mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengelolaan Aloksi Dana Desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi kepala desa sawah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Secara Aakademis

Secara Akademis penelitian ini adalah untuk syarat dalam memenuhi jenjang studi akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmiah dan berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang perna didapat selama dibangu perkuliahan.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menganalisis peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun rencan Sistematika laporan penelitian yang di lakukan pada penelitian di atas adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di uraikan teori-teori dan berbagai literatur yang berkaitan dengan judul penelitian Bab ini juga terdiri dari konsep operasional, variabel penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah, struktur organisasi dan sumber daya organisasi, informasi lain yang relevan dengan judul penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai sumbangan dari pemecah masalah yang di hadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dengan kata lain Kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa selaku lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengelolaan Keuangan Desa Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Rencana Kerja Pemerintah desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya disebut dengan RKPDesa adalah penjabaran dari rencana Pembangunan jangka Menengah untuk jangka waktu 1 tahun, dan anggaran pendapatan belanja desa disebut juga dengan APBDesa rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dipertunjukan bagi desa yang bertrasper melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyai penyelenggraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

2.2 Otonomi Daerah

Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi dan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota di dasarkan pada asas desentralisasi yang di laksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendir

berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Keastuan Republik Inonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerinta kepada gubernur seabgai wakil pemerintah/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Widjaja (2000:4) keweangan otonomi luas adalah keleluasaaan daerah untuk menyelenggarakan pemrintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fisikal, agama, serta kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Sedangkan otonom yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawab sebagai konsenkuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus di pikul oleh daearah dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Otonomi Desa

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000:192) bahkan menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang pemerintahan disebut pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aperatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

Menurut widjaja (2003:4-5) otonomi desa dianggap sebagai wewenang yang telah ada tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat, jadi istilah” otonomi desa” lebih tepat bila di ubah menjadi “otonomi masyarakat desa” yang berarti masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.

Untuk melakukan otonomi desa baik berupa kelembagaan menurut widjaja (2003:23) segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan untuk itu tahap awal dari ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Menurut Widjaja (2003:12) kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat menuntun dan dituntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ke tiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja serta keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara nya warga.

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya di arahkan pada potensi-potensi yang memiliki desa, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat di maksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transfortasi, agar jalan yang di tempuh tidak desktruktif, melaikan tetap mempertimbangan kepentingan generasi ke depan.

Widjaya (2003:11) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, masyarakat adat/primodial atau tradisional, sangatlah berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban) dalam menggerakkan nya karna sebagaimana masyarakat desa pada umumnya hanya dapat di gerakkan dengan

memperhatikan adat setempat yang hidup dan berkembang serta diikuti dan di perlihora oleh masyarakat.

2.4 Konsep Peranan

Menurut Purwadaminta peran adalah bagian yang di mainkan oleh seorang memainkan dalam sandiwara ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang di berikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang di dilaksanakan. Mengenai peranan ini Suharto (2006:32) mengemukakan beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Peran sebagai Suatu Kebijakan
2. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik yang di dilaksanakan,
3. Peran sebagai strategi.

Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seorang melakukan hak dan kewajibanannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007:37). Analisis terhadap prilaku peranan, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: Ketentuan peran, gambaran peran dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus di tampilkan seseorang dalam membawa peranannya.

Pengertian Peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah di kemukan oleh Sarjono Sukanto

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

2. Peran kepala Desa

Dalam Kamus Besar Indonesia (1996:751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran Menurut Soerjono Soekanto (2006:212), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang pertunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam Struktur organisasi pemerintahan desa, di sebutkan bahwa:” Kepala Desa dalah pemimpin Pemerintahan Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya di banatu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan d lantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun , dan dapat di perpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/ Wakil Kota Perangkat Desa lainnya diangkat oleh kepala Desa dari penduduk desa, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Perangkat Desa juga mem punyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Tugas dan Fungsi Kepala desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2015 pada pasal 6-10 yakni:

Pasal 6

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi pendudukan, dan penetapan dan pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas dan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.3 Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peraturan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atau sejauh mana aturan demokrasi ditetapkan dalam pemerintah Desa sekaligus merupakan tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Widjaja (2003:3) mengemukakan mengenai perhatian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa:

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Pemerintahan desa atau di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelengraan pemerintahan desa Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintahan desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintahan terdiri atas kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang di sebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksanaan tehnis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayaan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

2.1 Peranan Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa maka kepala desa atau persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa adalah orang yang memimpin, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa dan kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun. Kepala desa mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin dan pertanggung jawab jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui pemerintah desa menurut Kartohadikoesoemo (1984:184) adalah diselenggarakan oleh pemimpin desa yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat desa. Dilihat dari bentuk tata pemerintahan desa itu dapat digolongkan pada dua macam adalah:

1. Pemimpin pemerintahan yang diletakkan di tangan seseorang Kepala Desa.
2. Pemimpin pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan.

Jadi Kepala Desa yaitu pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan juga terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 2005 menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sedangkan dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengajukan rancangan peraturan desa,
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa,
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang –undang otonomi daerah nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewajiban Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan perda berdasarkan peraturan pemerintah. Dan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Kepala Desa dalam melakukan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban diantara nya yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melaksanakan kehidupan demokratis;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undang
- 8) Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Melaksanaan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- 10) Melaksanaan urusan yang terjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- 12) Membina, mengayomi dan melestrikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban.

Menurut Widjaja (2003:31) mengingatkan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadikan Kepala Desa. Persyaratan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kemampuan untuk menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan yang di embannya, secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dan memiliki kelebihan-kelebihan anatra lain yaitu:

- Kelebihan dalam penggunaan pemikiran rasio dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat dan tujuan akan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan akan keluhuan azas-azas yang mendasari organisasi yang di pimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif dan professional sehingga tercapainya hasil yang maksimal.
- Kelebihan dalam rohaniah dala arti memiliki sifat-sifat keluhuan budi, integrasi moral saehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang di pimpinnya.
- Kelebihan dalam hal fisik dalam arti dapat memberikan contoh konkrit dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

2.10 Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program di rumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Grindle (dalam Nugroho,2004:174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar,yakni variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*content of policy*” (isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*” (lingkungan kebijakan). Variabel isi kebijakan mencakup yaitu:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. (siapa) Pelaksanaan program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlihat
- Karakteristik dan lembaga penguasa

- b. Kepatuhan dan daya tangkap

Menurut Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah menampilkan keaktifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada” empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keaktifan implementasi kebijakan

1. Ketetapan ini di nilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian apakah kebijakan tersebut sudah di rumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak di pecahkan dan apakah kebijakan di buat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketetapan pelaksanaan

Kebijakan Aktor implementasi kebijakn tidak hanya pemerintahan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksanan yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan. Dimana kebijakan yang bersifat monopoli seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya di selenggarakan oleh pemerintahan. Kebijakan yang bersifatnya memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya selenggarakan oleh pemerintahan bersama masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintahan kegiata masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintahan kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintahan barsama swasta.

3. Ketetapan target kebijakan

Ketetapan target ini berkenan dengan tiga hal yaitu: pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang di rencanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, kedua apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diinervensi atau tidak, Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi implementasi kebijakan sebelumnya Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama degan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Ketetapan lingkungan kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opini yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan *interpretive institutions* yang berkenaan dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

N. Dunn (2000:169) menambahkan dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan ada tiga tahap yang harus di laksanakan yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan (evaluasi).

2.11 Pembangunan Desa

Menurut Kunarjo (1993:6) pembangunan harus di artikan lebih dari pemenuhan kebutuhan materi dalam kaehidupan manusia. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek dan hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Menurut Widjaj (2003:23) desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang harus pada perncanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai

2.12 Penelitian terdahulu

Deibby K.A Pangkey UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) Manado, Sulawesi Utara Indonesia dengan judul peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa tatelu satu kecamatan mandolong kabupaten minahasa dengan kesimpulan adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan desa termasuk kepala desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan kepala jaga yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya, kepala desa berkewajiban mendampingi semua pembangunan secara fisik yang di tetapkan oleh hasil musrembang di tingkat desa.

Waniarsih (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Peran Kepala Desa dalam meralisasikan penggunaan anggran dana desa dengan kesimpulan Alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak lebih di arahkan untuk pembangunan insfrastruktur desa yaitu pembangunan tuju perbatasan desa pembangunan jalan menuju kebun warga pembangunan dreinase dan pembangunan rabat reton dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pembinaan masyarakat desa belum pernah diadakan pembinaan masyarakat dan dalam bidang pemberdayaaan masyarakat pernah diadakan penelitaian kelompok tani pada tahun 2014.

Kesi Widjajanti (2011) Universitas Semarang dengan judul Model Pemberdayaan Masyarakat Kesimpulan Penelitian ini memberikan kesimpulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap masalah yang di ajukan sebelumnya yaitu bagaimana proses meningkatkan keberdayaan warga masyarakat melalui proses pemberdayaan terwujud dari model sosial model manusia model fisik dan kemampuan pelaku.

Candra Kusuma Negara Putra (2013) Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kesimpulan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan Masyarakat Wonoerjo Kecamatan Singosari kabupaten Malang, menunjukkan bahwa sebagian dari Dana Desa ADD untuk memberdayakan Masyarakat di gunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.13 Pandangan Islam

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah : 1. Dengan musyawarah Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini.

Menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan satu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah/konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi musyawarah/konsultasi. Misalnya ajaran-ajaran islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan.¹⁸ Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfiraman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syuura: 38).

2.14 Defenisi Konsep

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka perlu diberikan defenisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk menetapkan suatu kebijakan/program. Dalam penelitain ini adalah penetapan rencana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. adalah penetapan rencana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan/program. Dalam penelitian ini adalah kegiatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
3. Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2.15 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data, Konsep operasional dalam penelitian ini adalah.

1. Peran adalah fungsi yang dijalankan oleh lembaga dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kepala Desa adalah kepala kampung atau orang yang mengepalai desa sedangkan yang dimaksud dengan kepala desa dalam penelitian ini adalah kepala desa Sawah yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten /Kota untuk desa yang bersumber dari bagian

dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten/ Kota.

2.16 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu: Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Pengawasan pemanfaatan Alokasi Dana Desa(ADD)

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dan sub indikator dari konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indicator
Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan ADD di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	1. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Musyawarah desa b. Melibatkan kelembagaan desa c. Merumuskan anggaran pembangunan d. Menetapkan anggaran bersama BPD. e. Koordinasi
	2. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai perencanaan b. Sesuai dengan peraturan desa c. Transparansi d. Partisipasif e. Akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

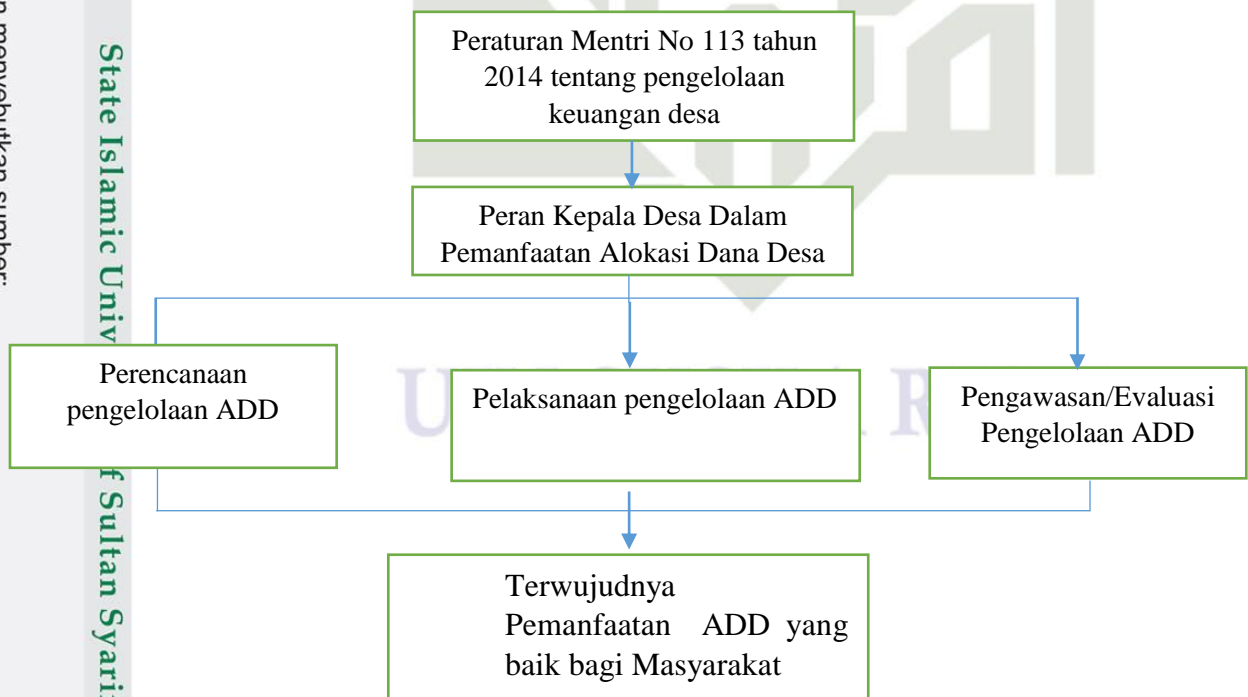
Variabel	Indikator	Sub indicator
	3. Pengawasan/Evaluasi	a. Pengawasan internal rutin b. Kontrol sosial masyarakat c. Pengawasan yang dilakukan BPD d. Pemantauan oleh BPD

Sumber:N.Dunn (2000:169)

2.17 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan,maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dan penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.I Kerangka Pikiran Tentang PerananKepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar waktu penelitian di mulai pada 12 Mei 2019-Juni 2019.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mana melakukan penelitian langsung di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar guna mendapatkan gambaran-gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel dan di lengkapi dengan uraian –uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian berikut:

- a. Data Primer. Menurut Iskandar data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Data sekunder, menurut Iskandar ,data skunder adalah data yang di peroleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi berupa penalaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lain nya yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan peneliti). Data sekunder dan penelitian inidi proleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dsri sejumlah data yang tersedia secara tetulis yang berupa data sejarah singkat, struktur organisasi jumlah staf Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.serta data-data yang lain meurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi. Menurut Usman tehnik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gelaja-gejala yang di teliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.
- b. Wawancara. Menurut Ridwan''Wawancara yaitu sautu cara pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya'' Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh data mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

- c. Dokumentasi, Menurut Ridwan tehnik dokumentasi adalah di tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-
- d. buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian, tehnik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

3.5. Tehnik Informan

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti penentuan informasinya menggunakan tehnik purposive (bertujuan), tehnik puporsive adalah tehnik penentuan informan berdasarkan pada pengembangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informan mengenai masalah dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Masyarakat Desa Sawah	4.	Key Informan
2.	Perangkat Desa Sawah	3.	Key Informan
4.	Ketua BPD Desa Sawah	1.	Key Informan

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong.(2010) yaitu:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengantar sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahanlain yang didapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda(terhadap suatu fenomena)dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain.”

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang di pakai untuk menganalisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusataan, perhatian pada penyederhanaan, penyabstrakan dan trasanformasi data”kasar” yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan reduksi mampu memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya informasi yang dapat lapangan di sajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian berusaha menyajiakn data yang tepat dan akurat.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam tahapan analisis intertif menurut Miles dan Huberman (2009-18-21) adalah penarikan kesimpulan dan verfikasi yaitu menimbulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Sawah

Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Utara yang luas wilayahnya 23.959,75 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Sawah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Naga Beralih
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jalau

Jarak ke Ibu Kota Bangkinang 12 km², jarak ke Ibu Kota Kabupaten 12 km², jarak ke Ibu Kota Propinsi Riau 62 km², Desa Sawah ini terbagi dari 4 Dusun, yaitu Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Pulau Tengah, Dusun Sangkar Puyuh.

4.2 Demografis

Berdasarkan pendapatan, jumlah pendapatan yang ada di Desa sawah berjumlah 3099 jiwa dengan kepala keluarga 765 KK, pada akhir tahun 2017 untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase%
1.	Laki-laki	1542	49,8%
2.	Perempuan	1557	50.2%
	Jumlah	3099	100%

Sumber: Rincian Dan Statistik Desa Sawah 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel di atas bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin lebih banyak perempuan dari pada laki-laki dengan jumlah perempuan sebanyak 1557 dengan persentasenya 50,2%.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase%
1.	1-12 Tahun	1353	43,6%
2.	13-40 Tahun	949	30,6%
3.	41-60 Tahun	521	16,8%
4.	61-80 Tahun	223	7,2%
5.	>80 Tahun	53	1,7%
	Jumlah	3099	100%

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut usia/umur yang memiliki jumlah terbanyak adalah usia/ umur 1-12 tahun dengan jumlah 1353 dengan tingkat persentasenya adalah 43,6% sedangkan yang paling rendah adalah berumur >80 tahun yaitu berjumlah 53 dengan tingkat persentase 1,7%.

4.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Sawah menunjukkan ketinggalan jika di bandingkan dengan desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kampar Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase%
1.	Taman Kanak-Kanak	120	7,4 %
2.	Sekolah Dasar	492	30,3 %
3.	SMP/SMA	723	44,6%
4.	Akademik (DI-D3)	179	11,0 %
5.	Sarjana (SI-S3)	109	6,7%
	Jumlah	1623	100%

Sumber: Rincian Data Statistik Desa Sawah Tahun 2017

Berdasarkan Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di desa sawah yang paling banyak adalah tamatan SMP/SMA sederajat yaitu berjumlah 723 dengan persentase 44,6% dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tamatan Sarjana (SI-S3) yaitu berjumlah 109 dengan persentase 6,7%.

Disamping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dan ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Desa Sawah maka Pemerintahan Desa Sawah harus memiliki sarana pendidikan yang cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase%
1.	Play Grup	2	33,3%
2.	TK	1	16,7%
3.	SD/Sederajat	2	33,3%
4.	MTS/Sederajat	1	16,7%
5.	SMA/Sederajat	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Sawah Kecamatan Utara yang paling banyak yaitu play grup yaitu berjumlah 2 dengan tingkat presentase 33,3%, sedangkan sarana pendidikan untuk SMA sederajat belum ada di dirikan, Hal ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar supaya bisa mendirikan sekolah SMA sederajat demi meningkatkan pendidikan di desa tersebut.

4.4 Kehidupan Beragama

Agama merupakan sesuatu hal yang dianut dan di percayai dalam kehidupan manusia seperti halnya agama islam. Agama islam merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh umat muslim. Seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar seluruh masyarakatnya beragama Islam. Berdasar data yang di peroleh dari kantor kepala desa sawah yang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3099 jiwa, mayoritas penduduk yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penganut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1542	1557
2.	Kristen	-	-
3.	Katolik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	1542	1557

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat yang ada di desa sawah pada umumnya menganut agama islam, sehingga diperlukan adanya sarana peribadatannya. Untuk lebih jelasnya, adapun sarana peribadan yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-masing Agama

No.	Jenis Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Surau/musholah	7
	Jumlah	12

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tempat peribadatan yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar hanya ada dua jenis tempat peribadatan yaitu masjid dan mushollah dimana jumlah masjid sebanyak 5 dan jumlah mushollah sebanyak 7 hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar semua masyarakatnya beragama Islam.

4.5 Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat di Desa Sawah berada pada posisi menengah apabila di bandingkan dengan Desa lain yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara hal ini berdasarkan observasi penulis lakukan dapat dilihat dari segi tempat tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sawah dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase%
1.	Petani	1239	74,91%
2.	Buruh Tani	111	6,71%
3.	PNS	152	7,31%
4.	Pedagang	121	9,18%
5.	Bidan/Perawat	22	1,33%
6.	TNI/POLRI	2	0,12%
7.	Pensiunan	7	0,42%
	Jumlah	1654	100%

Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bermata pencaharian mayoritas yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah sebagai petani yaitu dengan jumlah 1239 orang dengan tingkat persentase 74,91% disusul oleh PNS dengan jumlah 152 orang tingkat persentase 9,18% dan yang paling sedikit menurut jenis pencaharian adalah TNI/POLRI yaitu sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase 0,12% dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkat mata pencaharian yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1239 orang persentase 74,91%.

4.6 Adat Istiadat

Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar juga melakukan upacara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

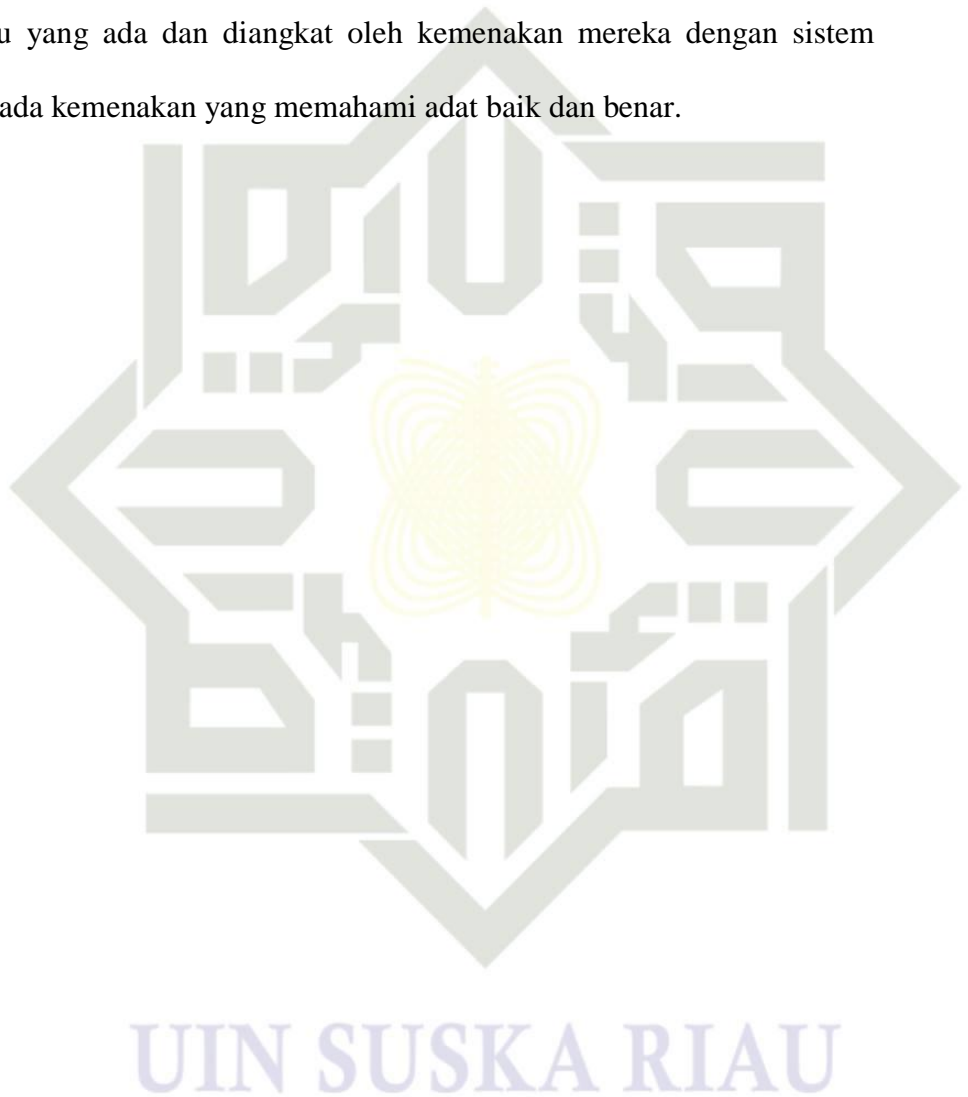
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4.7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

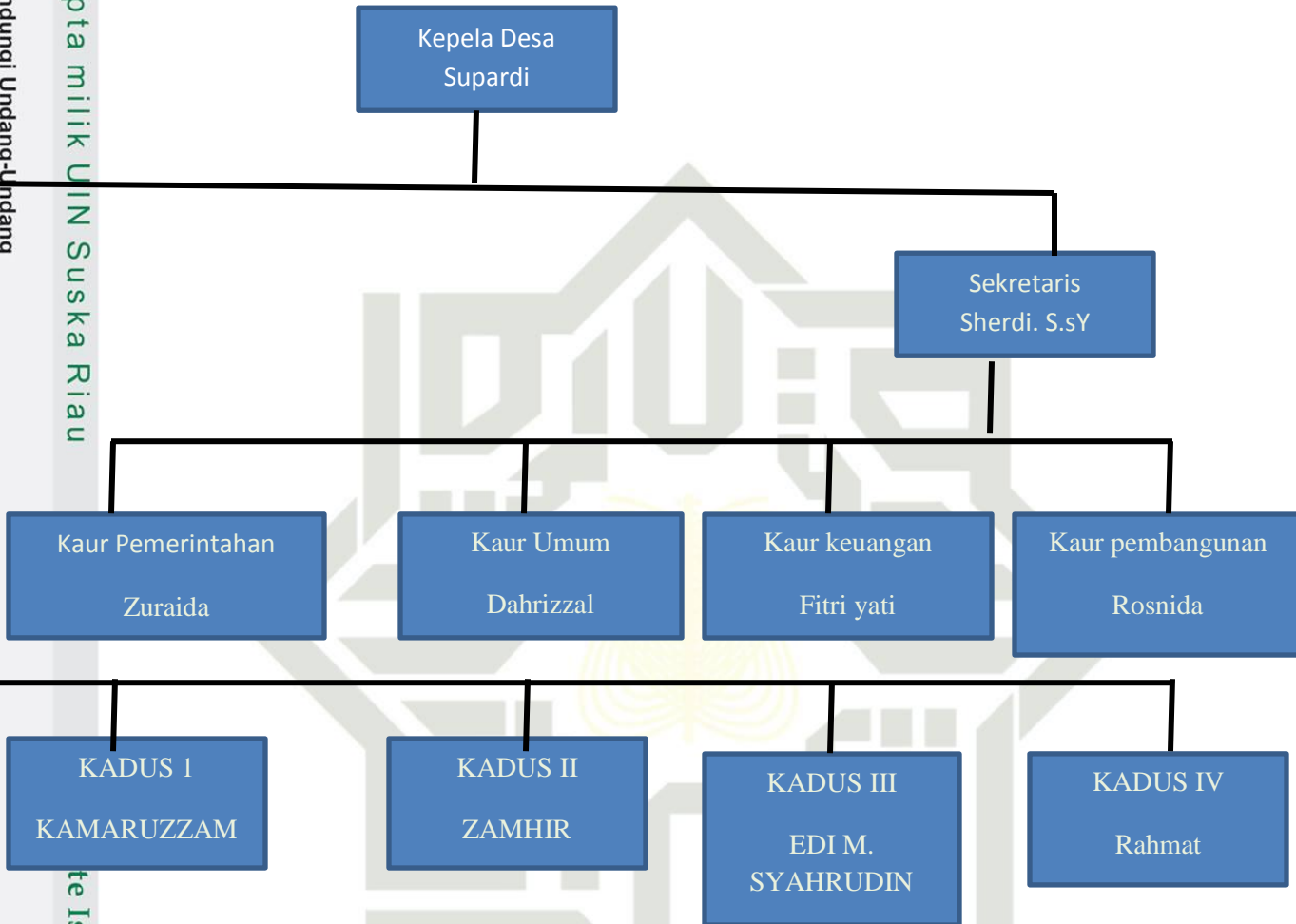
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

te Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum optimal. Ini terlihat dimana persentase hanya 22,05 % dari keseluruhan indikator penelitian yang penulis kemukakan yang dinyatakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini berarti bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat.
2. Hambatan Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah lemahnya sumber daya manusia yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar maupun pemerintah desa dan Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mendukung proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.



Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa hendaknya melibatkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa Sawah dan mengedepankan musyawarah dalam memperoleh keberhasilan hasil mufakat, melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh masyarakat desa dan menampung aspirasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa.
2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, hendaklah meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan melakukan pemantauan secara berkala.
3. Kepada Masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar agar dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita R.2013. *Pembangunan Perdesaan :Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* .Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Awis, 2014 *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* Alfabeta, Bandung.
- Awang Azam.2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chandra Kusuma Putra.*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Universitas Brawijaya Malang.
- Dr. J. Kaloh.2007. *Mentri Bentuk Otonomi Daerah*.Jakarta
- Kesi Widjajanti 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni, Semarang
- Nugroho Riant.2013. *Metode Penelitian Kebijakan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lifa Indri Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Universitas Brawijaya, Malang
- Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Prof. Drs. Haw.Widjaja. 2005. *Penyelenggraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Poerwadarminta.W.J.S.2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintahan No.72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Desa
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa



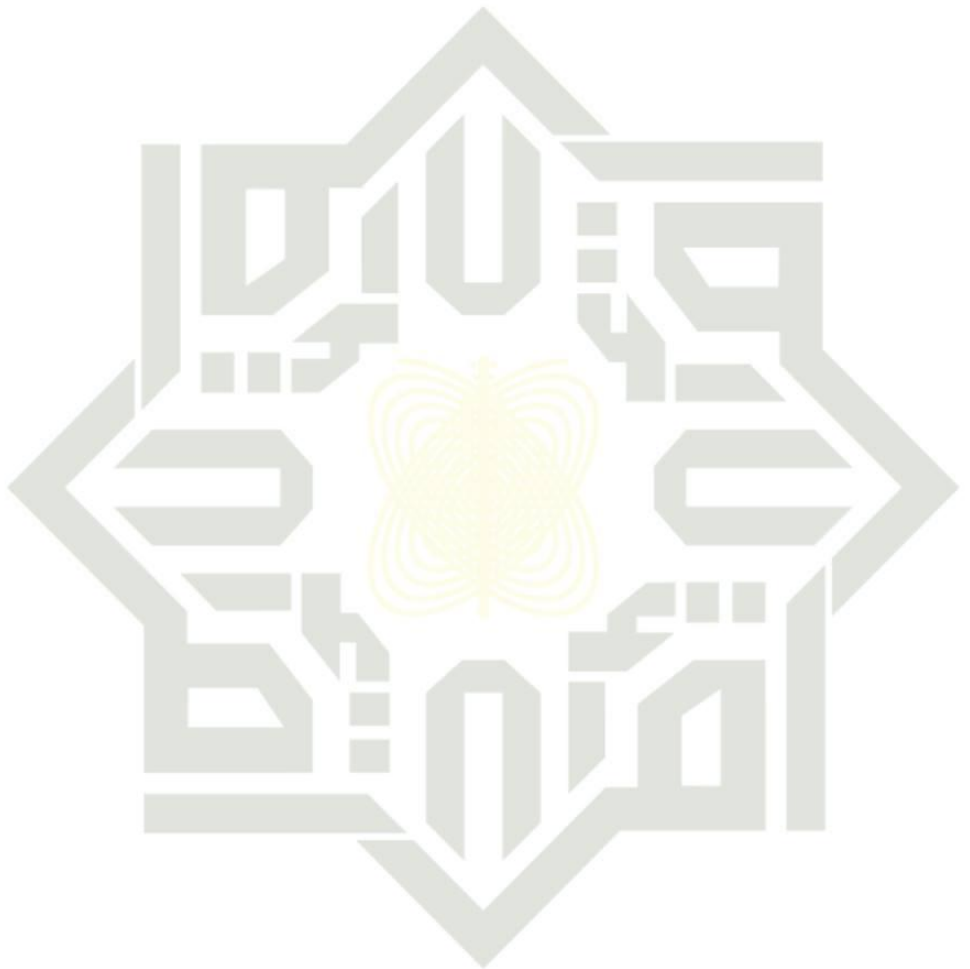
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja. Haw.2003. *Otonomi Desa Merupaka Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*.
Raja Grafindo Persada, Jakarta



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

TENTANG PERAN KEPALA DESA SAWAH DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

1. Bagaimanakah Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
2. Bagaimanakah rencana Penetapan anggaran pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan
3. Dalam melakukan pertemuan, apakah masyarakat dilibatkan untuk mengetahui usulan-usulan mengenai jenis kegiatan atau Melibatkan kelembagaan Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?Jelaskan
4. Apakah yang di bahas Dalam Musrembang mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
5. Bagaimanakah koordinasi mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
6. Bagaimanakah sistem pelaksanaan pemanfatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan
7. Apakah sistem pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Apakah pelaksanaan telah sesuai dengan peraturan desa mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
9. Bagaimanakah Transparansi mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
10. Bagaimanakah partisipatif masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
11. Bagaimanakah Akuntabilitas Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
12. Bagaimanakah Pengawasan/Evaluasi mengenai Pemanfaatan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
13. Apakah pernah diadakan pengawasan internal rutin dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
14. Apakah pernah diadakan kontrol Sosial Masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan
15. Bagaimanakah pengawasan yang di lakukan oleh BPD mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah pemantauan yang dilakukan oleh BPD dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Jelaskan
1. Bagaimanakah keberhasilan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan
1. Apakah terjadi penyimpangan dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan
1. Bagaimanakah solusi jika terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ? Jelaskan

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR UTARA
KANTOR KEPALA DESA SAWAH

ALAMAT : Jln. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

KODE POS : 28461

Sawah, 19 Agustus 2019

Nomor : 100/Pem/ **503**
Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial
Di_
Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Saudara/i Nomor : 070/Kessos/202 tanggal 28 Juni 2019, perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

N a m a : **MARDIATUL ULFA**
Nomor Mahasiswa : 11575204928
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (DD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.**

Lokasi Penelitian : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Untuk itu kami Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada prinsipnya menjelaskan yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

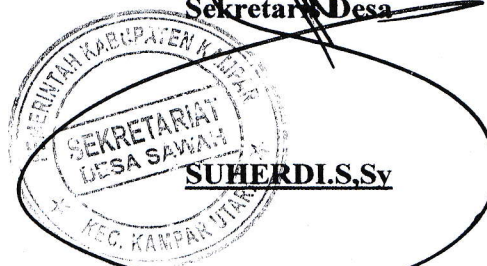
Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu"alaikum Wr Wb.

DIKELUARKAN DI: S A W A H
PADA TANGGAL : 19-08-2019

An.KEPALA DESA SAWAH

Sekretaris Desa



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR UTARA

SAWAH

KODE POS : 28461

Sawah, 28 JUNI 2019

Nomor : 070/Kessos /202
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Riset**

Kepada Yth,
Kepala Desa Sawah
Kec.Kampar Utara Kab. Kampar
Di-

TEMPAT

بسم الله الرحمن الرحيم
السلم عليكم وراحمة الله وبراكاة

Berdasarkan surat Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan politik (KESBANGPOL)
Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/341 Tanggal 24 April 2019, Perihal
Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

Nama : **MARDIATUL ULFA**
Nomor Mahasiswa : 11575204928
Universitas : UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Fakultas/Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN
KAMPAR.**
Lokasi Penelitian : **DESA SAWAH KECAMATAN
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

Untuk itu Kami Camat Kampar Utara pada prinsipnya dapat memberi izin kepada yang
bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. .

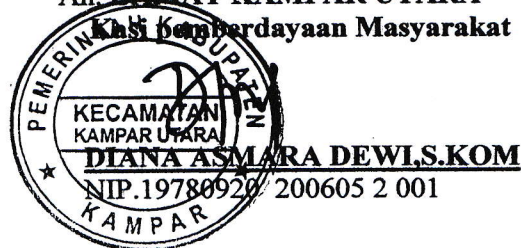
Pelaksanaan Riset tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung surat ini
dikeluarkan.

Demikian Kami sampaikan kiranya Saudara dapat membantu pelaksanaan Riset tersebut
sebagaimana mestinya.

والسلم عليكم وراحمة الله وبراكاة

DIKELUARKAN : DI SAWAH
PADA TANGGAL : 28 Juni 2019

An. CAMAT KAMPAR UTARA
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan



IN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2800/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 16 April 2019 M
10 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

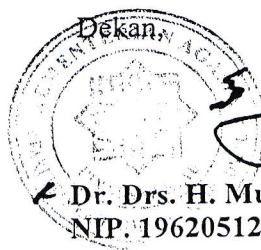
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mardiatul Ulfa
NIM : 11575204928
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2801/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 16 April 2019 M
10 Sya'ban 1440 H.

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mardiatul Ulfa
NIM. : 11575204928
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/341

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON-RISET/21959 tanggal 25 April 2019, dengan ini Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MARDIATUL ULFA |
| 2. NIM | : | 11575204928 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | SI |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | KANTOR KEPALA DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di buat.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 24 April 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kesatuan Bangsa


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Bangkinang Kota
2. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/21959
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.VII/PP.00.9/2801/2019 Tanggal 16 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MARDIATUL ULFA |
| 2. NIM / KTP | : | 11575204928 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KEPALA DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

dengan Ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP



Mardiatul ulfa dilahirkan di Desa sawah Kecamatan kampar utara Kabupaten Kampar, pada tanggal 05 januari 1996. Lahir dari pasangan M.nuri dan rohma yulis, yang merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah masuk sekolah dasar di SD Negeri 021 Sawah dan lulus pada tanggal 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Sawah dan tamat pada tahun dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar (SMAN1) dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 melalui jalur mandiri di terima menjadi mahasiswa program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada awal Januari 2018 melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dinas perkerjaan umum dan penataan ruang Daerah Kabupaten Kampar

Pada bulan juli sampai September 2018 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar. Penulis mulai melakukan penelitian juli 2019 di Kantor desa Sawah Kabupaten kampar kecamatan kampar utara.

Pada tanggal 27 September 2019 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Sosial melalui siding tetutup Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.